KLIPING MEDIA CETAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

No.	Tanggal	Media	Berita
1.	13 September	Investor Daily Indonesia	OP akan Turunkan Harga Garam Jadi Rp 4.000/Kg
2.	13 September	Kompas	Operasi Pasar Garam Dikaji
3	13 September	Media Indonesia	Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar
4.	13 September	Harian Kontan	Surat Tugas Jadi Dalih PT Garam Tidak Menyerap Garam Petard
5.	13 September	mediaindonesia.com	Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar
6.	13 September	antarakaltim.com	Persediaan Garam Penajam Cukup Hingga Akhir September

Mengetahui
a.n Kepala Bagian Humas dan Kerjasama
Ka. Sub Bagian Humas

Hery Gunawan Daulay

Berikut kami sampaikan Ringkasan Pemberitaan PRL 13 September 2017 Media Cetak dan Online

No	Media	Judul	Ringkasan
1.	Investor Daily Indonesia	OP akan Turunkan Harga Garam Jadi Rp 4.000/Kg	PT garam tengah mengusulkan kepada pemerintah agar garam sisa impor segera digelontorkan ke industri pengolahan garam konsumsi.
2.	Kompas	Operasi Pasar Garam Dikaji	Pemerintah mengkaji operasi pasar untuk garam konsumsi di masyarakat. Saat ini, harga garam di tingkat konsumen cenderung tinggi di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, sedangkan harga garam di tingkat Petambak merosot seiring musim panen.
3.	Media Indonesia	Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar	Sisa garam impor didistribusikan melalui operasi pasar untuk menekan harga garam konsumsiyang tinggi.
4.	Harian Kontan	Surat Tugas Jadi Dalih PT Garam Tidak Menyerap Garam Petard	Rencana penyerapan garam petani oleh PT garam belum bisa direalisasikan. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut KKP mengatakan pemerintah juga tengah membahas pemberlakuan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam untuk mengantisipasi penurunan harga garam saat panen raya
5.	mediaindonesia.com	Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar	PT Garam (persero) menyampaikan sisa garam impor yang didatangkan dari Australia belum sepenuhnya bakal didistribusikan untuk industri kecil dan menengah (IKM). Sisa garam impor sebanyak 47 ribu ton itu menurut rencana akan digelontorkan melalui operasi pasar (OP). Direktur Utama PT Garam Dolly Pulungan mengutarakan pihaknya akan meminta izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar dapat memproses sisa garam impor tersebut.
6.	antarakaltim.com	Persediaan Garam Penajam Cukup Hingga Akhir September	Persediaan komoditas garam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hanya mecukupi kebutuhan hingga akhir September 2017, kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setempat, Rusli. "Mudah–mudahan pemerintah provinsi meningkatkan pengiriman garam dari daerah pemasok, sehingga dapat menambah stok garam di pasaran," ujar Rusli ketika ditemui di Penajam, Selasa.

KLIPING MEDIA CETAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kerjasama Humas dan Pelayanan

Media	:	Investor Daily Indonesia	Tanggal : 13 September 2017
Halaman	:	7	
Judul	:	**OP akan Turunkan Harga Garam Jadi Rp 4.000/Kg**	
Ringkasan	:	PT garam tengah mengusulkan kepada pemerintah agar garam sisa impor segera digelontorkan ke industri pengolahan garam konsumsi.	

OP akan Turunkan Harga Garam Jadi Rp 4.000/Kg

JAKARTA – PT Garam tengah mengusulkan kepada pemerintah agar garam sisa impor segera digelontorkan ke industri pengolahan garam konsumsi. Melalui upaya yang mirip dengan skema operasi pasar (OP) tersebut diharapkan harga garam bisa ditekan menjadi Rp 4.000 per kilogram (kg) dari saat ini yang masih Rp 3.000 per 250 gram. BUMN itu mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi 75 ribu ton.

Direktur Utama PT Garam Dolly Pulungan mengaku sedang mempersiapkan surat pengajuan permohonan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menggelontorkan sisa garam impor ke pasar. PT Garam optimistis apabila garam sisa impor tersebut digelontorkan segera maka harga yang saat ini masih tinggi bisa ditekan. "Surat akan kami sampaikan besok (hari ini), karena memang menunggu tenggat waktu distribusi selesai. Kami akan coba minta persetujuan Ibu Menteri, kalau bisa kami distribusikan kepada *processor* (industri pengolahan garam konsumsi). Semacam operasi pasar, supaya kelangkaan tidak terjadi lagi. Kami ingin harga garam di tingkat konsumen bisa ditekan menjadi Rp 4.000 per kg," kata dia di Jakarta, Selasa (12/9).

Dolly mengatakan hal itu usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama jajaran dan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PT Garam mendapat penugasan mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton. Izin tersebut diberikan dengan pelaksanaan pemasukan per 10 Agustus 2017 yang mana izin berlaku hingga 31 Agustus 2017. PT Garam selanjutnya diwajibkan segera mendistrisbusikan garam tersebut kepada IKM pengguna maksimal 11 September 2017, yakni industri pengolahan garam menjadi garam konsumsi dan industri pengasinan ikan. Namun setelah masa distribusi habis, garam yang diimpor tersebut masih tersisa sekitar 47 ribu ton. Dolly menyarankan garam tersebut segera didistribusikan kepada industri pengolahan garam agar diolah segera menjadi garam konsumsi.

Berdasarkan pantauan, harga garam saat ini berkisar Rp 3.000 per 250 gram dan Rp 9.000 per 500 gram. Situs *infopangan.jakarta.go.id* memuat harga garam dapur per 12 September 2017 adalah Rp 3.958 per 200 gram. Menurut Dolly, harga tersebut masih relatif tinggi. "Iya IKM atau industri garam yang punya *processor*. Karena itu, kami usulkan segera didistribusikan. Sudah banyak industri yang berminat. Setidaknya ada 7-8 perusahaan pengolah, di antaranya di Lebak, Surabaya, Gresik, dan Tangerang. Waktunya hanya sampai September karena masuk Oktober sudah panen puncak. Ini supaya petambak jangan dirugikan harga yang jatuh," kata Dolly.

Industri pengolahan garam konsumsi, kata dia, saat ini membutuhkan garam untuk diolah. Di satu sisi, PT Garam mempunyai pasokan sekitar 47 ribu ton. "Kalau untuk dijadikan *buffer stock*, risikonya bagi perusahaan akan rugi karena harga pokok naik. Dampaknya, keuntungan PT Garam berkurang. Kalau harus untung, kita usulkan ke Ibu Menteri, agar garam dijual tapi dikontrol harganya. Kalau dijual di atas harga Rp 4.000 maka akan di-*black list*," kata Dolly.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, opsi mencadangkan garam sisa impor bisa saja dilakukan. Demikian juga dengan opsi operasi pasar. (eme)

KLIPING MEDIA CETAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kerjasama Humas dan Pelayanan

Media	:	Kompas	Tanggal : 13 September 2017
Halaman	:	17	
Judul	:	**Operasi Pasar Garam Dikaji**	
Ringkasan	:	Pemerintah mengkaji operasi pasar untuk garam konsumsi di masyarakat. Saat ini, harga garam di tingkat konsumen cenderung tinggi di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, sedangkan harga garam di tingkat Petambak merosot seiring musim panen.	

Operasi Pasar Garam Dikaji

Target Produksi Perlu Lebih Realistis

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengkaji operasi pasar untuk garam konsumsi di masyarakat. Saat ini, harga garam di tingkat konsumen cenderung tinggi di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, sedangkan harga garam di tingkat petambak merosot seiring musim panen. PT Garam mengajukan untuk menjadi penyangga harga garam.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Selasa (12/9), mengemukakan, pemerintah meminta PT Garam menyiapkan operasi pasar untuk garam konsumsi. Harga garam konsumsi di tingkat konsumen masih tinggi, sedangkan harga garam di tingkat petani terus menurun di musim panen.

"Saya ingin mereka (PT Garam) melakukan operasi pasar. Teknisnya akan dibicarakan dengan satgas pangan," katanya.

Brahmantya mengatakan, operasi pasar garam konsumsi diharapkan menekan harga garam di tingkat konsumen dari Rp 5.000-Rp 6.000 per kg jadi Rp 4.000 per kg. "Namun, upaya menurunkan harga garam di tingkat konsumen jangan sampai berdampak pada anjloknya harga garam di tingkat petambak," ujarnya.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum di Jakarta mengatakan, masa panen garam rakyat menyebabkan adanya sisa garam impor. Dari total impor garam sebesar 150.000 ton tahun ini, ditaksir ada sisa impor sekitar 40.000 ton. "Kami melayangkan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sisa (garam impor) mau diapakan," katanya.

Saat ini, harga garam impor untuk bahan baku konsumsi berkisar Rp 2.200 per kg. Adapun harga garam konsumsi di tingkat petambak berkisar Rp 1.500-Rp 2.000 per kg, sementara harga garam konsumsi di tingkat konsumen sekitar Rp 5.000-Rp 6.000 per kg. Brahmantya berpendapat, stok garam impor bisa diolah untuk operasi pasar. "Tinggal bagaimana koordinasi untuk pengawasan," katanya.

Direktur Utama PT Garam Dolly P Pulungan, mengemukakan, pihaknya siap menjadi badan penyangga garam untuk menjaga harga garam petambak tidak jatuh, sekaligus menjaga harga garam di tingkat konsumen tetap stabil.

"Operasi pasar bisa dilaksanakan jika kita ditugaskan pemerintah dan bekerja sama dengan pengolahan, termasuk mematok harga di konsumen," katanya.

Menurut Dolly, pihaknya sanggup menjaga harga garam di konsumen pada level Rp 4.000 per kg.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa, mengemukakan, kontrol impor garam industri yang lemah dan tata niaga yang tidak baik menyebabkan setiap kali panen harga garam petambak jatuh. Akibatnya, usaha tambak garam sulit tumbuh.

"Impor garam merusak iklim usaha petambak, karena garam impor untuk industri merembes dan tidak terkontrol. Kami memastikan PT Garam bisa menyerap garam rakyat semurah-murahnya Rp 600 per kg," kata Susi.

Anang mengemukakan, PT Garam saat ini belum mulai menyerap garam rakyat karena harga jual masih diatas Rp 1.000 per kg di tingkat petambak. Seiring musim panen raya, harga garam di tingkat petambak diprediksi akan terus merosot. "Nanti kalau harga garam petambak sudah di bawah Rp 1.000 per kg, akan kami serap di level harga Rp 1.000 per kg," katanya.

Swasembada

Menurut Susi, peningkatan kualitas garam perlu didorong dari tambak pada lahan potensial, seperti di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, masih ada kendala pembebasan lahan karena masih dikuasai oleh korporasi. Pihaknya berharap PT Garam bisa menggarap lahan tersebut.

"Saya masih kurang optimistis swasembada garam tercapai di tahun 2019. Namun, kita akan berusaha," kata Susi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan swasembada garam pada tahun 2019 dengan memanfaatkan ekstensifikasi lahan garam di beberapa wilayah potensial, seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengemukakan, target pencapaian produksi garam nasional harus realistis. Target produksi garam nasional sebanyak 4,1 juta ton pada tahun depan dikhawatirkan menyebabkan harga garam bakal kembali anjlok karena minimnya gudang penyimpanan garam rakyat di daerah-daerah kecil.

"Produksi garam konsumsi harus dicapai dulu, baru garam industri," kata Herman

Ia mengatakan, PT Garam perlu didukung sebagai badan penyangga garam melalui penyertaan modal negara. (LKT)

GARAM NASIONAL

Produksi garam per Agustus 2017: 122.000 ton

Target produksi garam nasional 2017: 3,2 juta ton

Target produksi garam nasional 2018: 4,1 juta ton

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INFOGRAFIK: DICKY

KLIPING MEDIA CETAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kerjasama Humas dan Pelayanan

Media	:	Media Indonesia	Tanggal : 13 September 2017
Halaman	:	18	
Judul	:	**Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar**	
Ringkasan	:	Sisa garam impor didistribusikan melalui operasi pasar untuk menekan harga garam konsumsiyang tinggi.	

Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar

Sisa garam impor didistribusikan melalui operasi pasar untuk menekan harga garam konsumsi yang tinggi.

JESSICA SIHITE
jessica@mediaindonesia.com

PT Garam (persero) menyampaikan sisa garam impor yang didatangkan dari Australia belum sepenuhnya bakal didistribusikan untuk industri kecil dan menengah (IKM). Sisa garam impor sebanyak 47 ribu ton itu menurut rencana akan digelontorkan melalui operasi pasar (OP).

Direktur Utama PT Garam Dolly Pulungan mengutarakan pihaknya akan meminta izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar dapat memproses sisa garam impor tersebut. Saat ini, kata dia, sudah ada tujuh industri pengelola garam konsumsi yang bersedia untuk mengolah sisa garam impor tersebut.

"Kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Susi besok (hari ini) untuk mengolah garam sisa itu. Nanti untuk operasi pasar," ungkap Dolly kepada *Media Indonesia*, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Dolly, produksi garam rakyat saat ini belum dapat meredam harga garam yang masih tinggi. Saat ini, berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta yang dikelola PT Food Station, harga garam di Jakarta saja masih mencapai Rp15 ribu per kilogram. Sementara itu, harga garam konsumsi secara nasional, menurut Dolly, sebesar Rp6.000 per kg.

"Makanya, kami ingin menggelontorkan (sisa garam impor) supaya harga garam menjadi Rp4.000 per kg sesuai dengan arahan pemerintah," tukasnya.

Sebagai informasi, izin impor garam yang diberikan pemerintah kepada PT Garam mencapai 75 ribu ton. Periode izin impor diberikan selama 2-31 Agustus 2017 dan harus didistribusikan ke industri kecil dan menengah (IKM) paling lambat 11 September 2017.

Saat ini sudah ada tujuh industri pengelola garam konsumsi yang bersedia mengolah sisa garam impor itu.

Namun, untuk melindungi produksi petani garam yang baru panen, tidak semua garam impor tersebut didistribusikan kepada IKM pengolah garam konsumsi dan pengasinan ikan.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum menambahkan, selain digunakan untuk operasi pasar, sisa garam impor pun menurut rencana akan didistribusikan kepada produsen garam konsumsi yang pernah berkontrak dengan perseroan.

Hal itu disebabkan produsen garam tersebut sudah sempat membayar pembelian garam pada akhir tahun lalu, tetapi mereka tidak mendapatkan pasokan garam lantaran produksi yang anjlok.

"Ada sekitar 10 ribu ton yang sudah dibayar produsen ketika itu. Jadi, mau kami kasih ke situ juga kalau ini sudah mendapatkan izin. Kalau tidak diizinkan, tentunya kami tidak akan berani karena ini kan impor khusus, bukan impor umum," ucap Anang.

Berkoordinasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengingatkan PT Garam agar berkoordinasi dengan Satgas Pangan sebelum mengadakan OP dari sisa garam impor. Itu bertujuan menghindari permasalahan hukum seperti yang pernah terjadi dan menjerat mantan Dirut PT Garam Achmad Boediono beberapa waktu lalu.

Menurut Brahmantya, PT Garam juga wajib melihat kondisi suplai dan permintaan garam konsumsi di masyarakat. "Ini ide PT Garam (untuk OP). Mereka melihat harga garam masih relatif tinggi. Untuk itu saya bilang koordinasi dulu dengan pengawasnya, Satgas Pangan," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai sisa garam impor tersebut sebaiknya menjadi stok penyangga (*buffer stock*). Namun, ia memang belum mendengar usulan dari PT Garam terhadap sisa garam impor dari Australia tersebut. "Sebaiknya buat *buffer stock* saja," cetusnya. (E-3)

KLIPING MEDIA CETAK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kerjasama Humas dan Pelayanan

Media	:	Harian Kontan	Tanggal : 12 September 2017
Halaman	:	22	
Judul	:	**Surat Tugas Jadi Dalih PT Garam Tidak Menyerap Garam Petard**	
Ringkasan	:	Rencana penyerapan garam petani oleh PT garam belum bisa direalisasikan. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut KKP mengatakan pemerintah juga tengah membahas pemberlakuan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam untuk mengantisipasi penurunan harga garam saat panen raya	

■ GARAM

Surat Tugas Jadi Dalih PT Garam Tidak Menyerap Garam Petani

JAKARTA. Rencana penyerapan garam petani oleh PT Garam belum bisa direalisasikan. Sebab hingga kini PT Garam belum mendapat surat penugasan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap garam yang dihasilkan petani.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu surat penugasan untuk menyerap garam petani. "Kami masih menunggu surat tugas untuk menjadi *off taker* dari menteri," ujarnya, Selasa (12/9).

Selain masalah surat, dia mengaku, penyerapan garam petani masih sulit dilakukan. Sebab harga yang ditetapkan PT Garam untuk membeli garam rakyat masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Catatan saja, PT Garam menetapkan harga Rp 1.000 per kilogram (kg) untuk membeli garam petani. Sedangkan HPP garam kualitas 1 sebesar Rp 1.250 per kg.

Anang bilang penyerapan garam petani untuk mendongkrak mutu garam. Nantinya PT Garam akan meminta petani meningkatkan mutu bila ingin garam produksinya diserap perusahaan pelat merah itu. "Selain itu kami akan pertanyakan kebutuhannya agar bisa kami bantu," jelasnya.

Nantinya garam yang terserap oleh PT Garam akan disimpan di gudang penyimpanan yang dibangun oleh KKP.

> **PT Garam masih menunggu surat tugas dari Menteri KKP untuk serap garam petani.**

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi berkilah, surat tugas belum ada karena surat permintaan PT Garam ke KKP belum ada. Dengan begitu maka PT Garam belum menyerap garam petani. Dia mengaku ia mendukung PT Garam menyerap garam petani agar perusahaan itu bisa menjalankan fungsinya memperbaiki kualitas garam petani. "PT Garam harus menjadi *off taker* bagi garam rakyat," ujarnya.

Satyamurti menjelaskan, pemerintah juga tengah membahas pemberlakuan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam untuk mengantisipasi penurunan harga garam saat panen raya. Dalam pembahasan HPP garam, KKP dan PT Garam mengusulkan harga garam kualitas 1 sebesar Rp 1.250 per kg, kualitas 2 Rp 1.000 per kg, dan garam kualitas 3 sebesar Rp 800 per kg.

KKP optimistis HPP garam segera disahkan, sehingga bisa diterapkan. Nantinya PT garam yang akan menyerap garam petani bila harga sudah jatuh di bawah HPP. Pemerintah juga sudah menyusun skema penyerapannya.

Abdul Basith Bardan

Sisa Garam Impor buat Operasi Pasar

Media Indonesia, 13 Sep 2017

PT Garam (persero) menyampaikan sisa garam impor yang didatangkan dari Australia belum sepenuhnya bakal didistribusikan untuk industri kecil dan menengah (IKM). Sisa garam impor sebanyak 47 ribu ton itu menurut rencana akan digelontorkan melalui operasi pasar (OP). Direktur Utama PT Garam Dolly Pulungan mengutarakan pihaknya akan meminta izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar dapat memproses sisa garam impor tersebut. Saat ini, kata dia, sudah ada tujuh industri pengelola garam konsumsi yang bersedia untuk mengolah sisa garam impor tersebut.

“Kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Susi besok (hari ini) untuk mengolah garam sisa itu. Nanti untuk operasi pasar,” ungkap Dolly kepada Media Indonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9). Menurut Dolly, produksi garam rakyat saat ini belum dapat meredam harga garam yang masih tinggi. Saat ini, berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta yang dikelola PT Food Station, harga garam di Jakarta saja masih mencapai Rp15 ribu per kilogram. Sementara itu, harga garam konsumsi secara nasional, menurut Dolly, sebesar Rp6.000 per kg. “Makanya, kami ingin menggelontorkan (sisa garam impor) supaya harga garam menjadi Rp4.000 per kg sesuai dengan arahan pemerintah,” tukasnya.

Sebagai informasi, izin impor garam yang diberikan pemerintah kepada PT Garam mencapai 75 ribu ton. Periode izin impor diberikan selama 2–31 Agustus 2017 dan harus didistribusikan ke industri kecil dan menengah (IKM) paling lambat 11 September 2017. Namun, untuk melindungi produksi petani garam yang baru panen, tidak semua garam impor tersebut didistribusikan kepada IKM pengolah garam konsumsi dan pengasinan ikan.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum menambahkan, selain digunakan untuk operasi pasar, sisa garam impor pun menurut rencana akan didistribusikan kepada produsen garam konsumsi yang pernah berkontrak dengan perseroan. Hal itu disebabkan produsen garam tersebut sudah sempat membayar pembelian garam pada akhir tahun lalu, tetapi mereka tidak mendapatkan pasokan garam lantaran produksi yang anjlok.

“Ada sekitar 10 ribu ton yang sudah dibayar produsen ketika itu. Jadi, mau kami kasih ke situ juga kalau ini sudah mendapatkan izin. Kalau tidak diizinkan, tentunya kami tidak akan berani karena ini kan impor khusus, bukan impor umum,” ucap Anang.

Berkoordinasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengingatkan PT Garam agar berkoordinasi dengan Satgas Pangan sebelum mengadakan OP dari sisa garam impor. Itu bertujuan menghindari permasalahan hukum seperti yang pernah terjadi dan menjerat mantan Dirut PT Garam Achmad Boediono beberapa waktu lalu.

Menurut Brahmantya, PT Garam juga wajib melihat kondisi suplai dan permintaan garam konsumsi di masyarakat. “Ini ide PT Garam (untuk OP). Mereka melihat harga garam masih relatif tinggi. Untuk itu saya bilang koordinasi dulu dengan pengawasnya, Satgas Pangan,” paparnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai sisa garam impor tersebut sebaiknya menjadi stok penyangga (buffer stock). Namun, ia memang belum mendengar usulan dari PT Garam terhadap sisa garam impor dari Australia tersebut. “Sebaiknya buat buffer stock saja,” cetusnya.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/122122/sisa-garam-impor-buat-operasi-pasar/2017-09-13

Persediaan Garam Penajam Cukup Hingga Akhir September

Antara Kaltim, 13 Sep 2017

Persediaan komoditas garam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hanya mecukupi kebutuhan hingga akhir September 2017, kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setempat, Rusli. "Mudah–mudahan pemerintah provinsi meningkatkan pengiriman garam dari daerah pemasok, sehingga dapat menambah stok garam di pasaran," ujar Rusli ketika ditemui di Penajam, Selasa.

Berdasarkan koordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM Kaltim, lanjut Rusli, persediaan garam mulai berkurang dan jika tidak ada pengiriman dari daerah pemasok, persediaan garam di Penajam Paser Utara hanya cukup hingga akhir September 2017. "Kami berharap ada peningkatan pengiriman garam dari daerah pemasok, karena di wilayah Jawa cuaca mulai bersahabat sehingga produksi garam bisa normal kembali," ucap Rusli.

Ia menyatakan, apabila pasokan garam terhambat, maka pada Oktober 2017 di Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengalami kelangkaan garam. Rusli menimpali lagi, jika kelangkaan komoditas garam terjadi, berdampak terhadap pelaku usaha ikan asin atau ikan kering di wilayah Penajam Paser Utara. "Kebutuhan garam untuk usaha ikan asin itu sekitar 200 kilogram per hari, kalau garam langka usaha ikan asin itu akan terhenti," ungkapnya.

Usaha ikan asin yang berada di Kecamatan Penajam, Waru dan Kecamatan Babulu, membutuhkan sedikitnya enam ton garam per bulan, dalam setahun dibutuhkan 72 ton garam untuk usaha ikan kering atau ikan asin itu. Sementara untuk kebutuhan garam dapur rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlau besar dibanding untuk keperluan usaha ikan asin.

"Rata–rata pemakaian komoditas garam untuk keperluan rumah tangga di wilayah Penjam Paser Utara hanya 100 kilogram per pekan," tambah Rusli. Ia menyatakan, seiring berkurangnya persediaan komoditas garam tersebut, mengakibatkan harga garam di pasaran mengalami kenaikan cukup signifikan, saat ini garam ukuran seperempat kilogram dijual dengan harga Rp5.000.

http://www.antarakaltim.com/berita/40059/persediaan-garam-penajam-cukup-hingga-akhir-september